

PERAN WIRAUSAHA DALAM MENCIPTAKAN EKOSISTEM BISNIS YANG BERSIH DARI KORUPSI

Bunga Pratiwi¹, Debby Chyntia Br Hombing², Amelya Rahmadani³, Amin Harahap⁴

^{1,2,3,4}Universitas Labuhanbatu

Email: bungapратиwi245@gmail.com¹, debbysintiya866@gmail.com²,
amelyarahmadani73@gmail.com³, aminharahap19@gmail.com⁴

Abstrak: Korupsi merupakan salah satu hambatan utama dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks dunia usaha, praktik korupsi tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan public dan integritas pasar. Jurnal ini membahas peran strategis wirausaha dalam menciptakan ekosistem bisnis yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Dengan mengedepankan nilai etika, inovasi, serta tata kelola yang baik, wirausaha dapat menjadi agen perubahan dalam membangun budaya bisnis yang bersih. Artikel ini membahas bagaimana wirausaha, sebagai penggerak utama ekonomi, memiliki peran krusial dalam menciptakan ekosistem bisnis yang transparan dan berintegritas. Melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), digitalisasi sistem, dan budaya organisasi yang beretika, wirausaha dapat memutus mata rantai praktik suap dan gratifikasi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa ekosistem bisnis yang bersih tidak hanya memberikan keadilan pasar, tetapi juga meningkatkan daya saing jangka panjang perusahaan. Korupsi dalam dunia bisnis seringkali dianggap sebagai "biaya pelumas" (grease money), praktik ini merusak kompetisi pasar dan inovasi. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana wirausaha, melalui kepemimpinan etis dan budaya organisasi. Dengan mengadopsi transparansi radikal dan tata kelola perusahaan yang baik, wirausaha tidak hanya melindungi bisnis mereka tetapi juga memaksa pasar untuk bergerak ke arah yang lebih adil.

Kata Kunci: Wirausaha, Ekosistem Bisnis, Antikorupsi.

Abstract: Corruption is a major obstacle to economic growth and sustainable development. In the business context, corrupt practices not only cause financial losses but also undermine public trust and market integrity. This paper examines the strategic role of entrepreneurs in creating a transparent, accountable, and corruption-free business ecosystem. By prioritizing ethical values, innovation, and good governance, entrepreneurs can become agents of change in building a clean business culture. This article discusses how entrepreneurs, as the main drivers of the economy, play a crucial role in creating a transparent and integrity-based business ecosystem. Through the implementation of good corporate governance (GCG), system digitization, and an ethical organizational culture, entrepreneurs can break the chain of bribery and gratification practices. The results of the discussion show that a clean business ecosystem not only provides market fairness but also increases a company's long-term competitiveness. Corruption in the business world is often considered "grease money," this practice undermines market competition and innovation. This article explores how entrepreneurs, through ethical leadership and organizational culture, can break the chain of bribery and gratification practices. By adopting

radical transparency and good corporate governance, entrepreneurs not only protect their businesses but also force the market to move towards fairer practices.

Keywords: *Entrepreneurship, Business Ecosystem, Anti-Corruption.*

PENDAHULUAN

Korupsi telah lama menjadi permasalahan serius di berbagai negara, termasuk dalam sektor bisnis. Praktik seperti suap, manipulasi, laporan keuangan, dan penyalahgunaan wewenang dapat menghambat pertumbuhan usaha yang sehat. Di sisi lain, wirausaha memiliki posisi unik sebagai pelaku ekonomi yang fleksibel, inovatif, dan mampu menciptakan budaya organisasi dari nol. Oleh karena itu, peran wirausaha menjadi krusial dalam membangun ekosistem bisnis yang menjunjung tinggi integrasi dan transparansi. Korupsi di sektor bisnis sering kali muncul dalam bentuk suap perizinan, pengaturan tender, dan gratifikasi kepada oknum pemerintah. Namun, munculnya generasi wirausaha baru yang mengedepankan Environmental, Social, and Governance (ESG) mulai mengubah paradigma ini.

Wirausaha bukan sekadar pencari laba, melainkan arsitek dari budaya organisasi yang transparan. Ekosistem bisnis yang sehat dapat kita lihat dari pondasi bagi daya saing negara. Namun praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sering kali dianggap “biaya yang tak terduga” yang menghambat efisiensi. Wirausaha menjadi motor penggerak ekonomi yang memiliki posisi yang unik untuk melakukan dekonstruksi terhadap budaya koruptif melalui praktik bisnis berbasis nilai.

LANDASAN TEORI

a. Integritas Supply Chain

Integrated Supply Chain Management (ISCM) atau Manajemen Rantai Pasok Terintegrasi (MRPT) merupakan konsep dasar supply chain management dengan pendekatan holistik dalam mengelola seluruh aliran produk, informasi, dan keuangan yang terkait dengan pengadaan bahan baku, produksi barang, dan pengiriman produk kepada konsumen. Fungsi Supply Chain Management

SCM memiliki tiga fungsi utama yang saling berkaitan, yaitu:

1. Fungsi Biaya : SCM membantu perusahaan dalam mengendalikan biaya produksi, perencanaan, transportasi, hingga operasional. Adanya pengelolaan biaya yang terstruktur, perusahaan dapat mencapai efisiensi tanpa mengorbankan kualitas produk.
2. Fungsi Fisik : Fungsi ini meliputi kegiatan produksi mulai dari pengolahan bahan mentah

hingga menjadi produk jadi. Dalam praktiknya, fungsi fisik juga mencakup kegiatan pengemasan, penyimpanan, serta pemeliharaan kualitas produk.

3. Fungsi Mediasi : SCM berperan sebagai penghubung antar pihak dalam rantai pasok. Fungsi mediasi penting untuk memastikan koordinasi antara pemasok, produsen, dan distributor berjalan efektif sehingga produk dapat tersedia sesuai kebutuhan pasar.

b. Tujuan Supply Chain Management

Tujuan utama SCM adalah menciptakan nilai tambah bagi konsumen sekaligus bagi perusahaan. Beberapa tujuan spesifik antara lain:

1. Memenuhi kebutuhan konsumen dengan layanan terbaik.
2. Mencapai efisiensi biaya melalui pengendalian persediaan dan logistik.
3. Meningkatkan profitabilitas perusahaan.
4. Memperkuat daya saing di pasar global.
5. Menciptakan hubungan jangka panjang dengan pemasok dan mitra bisnis.

Menurut Simchi-Levi, Kaminsky, dan Simchi-Levi (2008), keberhasilan SCM terletak pada kemampuannya menyelaraskan kepentingan seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pasok untuk mencapai tujuan bersama.

c. Prinsip-Prinsip Supply Chain Management

SCM memiliki lima prinsip dasar yang menjadi fondasi dalam pengelolaannya (Lambert, 2014):

1. *Plan* (Perencanaan)
2. *Source* (Sumber Bahan Baku)
3. *Make* (Produksi)
4. *Deliver* (Distribusi)
5. *Return* (Pengembalian)

d. Digitalisasi

Digitalisasi adalah proses penggunaan teknologi digital yang mengubah informasi, data dari format konvensional yang menjadi format digital. Tujuan dan manfaat dari digitalisasi dapat kita lihat yaitu :

1. Meningkatkan Efisiensi seperti dokumen kertas yang di scan menjadi pdf yang lebih mudah untuk mengelolanya.
-

2. Akses Informasi yang lebih mudah dengan menggunakan perangkat yang terhubung ke internet.
3. Mendorong Inovasi seperti menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan dapat berkolaborasi.
4. Penghematan Biaya seperti mengurangi pemakaian kertas dan proses manual.

e. Advokasi Kolektif

Advokasi adalah fondasi penting dalam perjuangan mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, tak heran jika advokasi ini sering diartikan sebagai pembelaan kasus atau aktivitas berbicara di pengadilan. Dapat kita lihat ada tujuan dari advokasi yaitu :

1. Membentuk pemahaman maupun kesadaran terhadap suatu masalah.
2. Mengubah suatu sistem/lembaga/program/kebijakan agar responsif pada suatu kebutuhan.
3. Menolong suatu kelompok yang ditolak oleh suatu lembaga atau sistem pelayanan.
4. Melakukan tindakan nyata atas solusi masalah.
5. Adanya ketertarikan untuk mengatasi masalah.
6. Memberi kepedulian alternatif solusi masalah.
7. Untuk melakukan tindak lanjut kegiatan.

Jenis-jenis advokasi secara umum antara lain:

1. Advokasi Klien
2. Advokasi Masyarakat
3. Advokasi Legislatif
4. Advokasi Administratif

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur (Library Research). Dari metode ini dapat kita ambil data sekunder yang diperoleh, serta artikel regular bisnis. Analisis yang diambil yaitu teknik analisis isi (content analysis) yang digunakan untuk mengidentifikasi pola perilaku wirausaha yang berkontribusi pada pencegahan korupsi. Fokus dalam penelitian juga berada pada metode ini karena terdapat 3 aspek : kepemimpinan yang etis, sistem kepatuhan yang internal, dan kolaborasi kolektif antar pelaku usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kepemimpinan Etis sebagai Pondasi

Wirausaha yang menerapkan standar etika yang tinggi sejak awal berdirinya usaha

cenderung menciptakan budaya organisasi yang resisten terhadap korupsi. Ketika pimpinan menolak memberikan suap untuk mempersingkat proses birokrasi, hal ini mengirimkan sinyal yang kuta kepada karyawan serta mitra kebisnisan.

2. Digitalisasi dan Transparansi

Penggunaan teknologi dalam operasional bisnis seperti e-procurement dan sistem pembayaran digital, oleh karena itu wirausaha terbukti mengurangi interaksi tatap muka yang beresiko menimbulkan negoisasi yang ilegal.

3. Aksi Kolektif (Collective Action)

Wirausaha yang telah bergabung dalam asosiasi bisni yang memiliki kekuatan lebih besar untuk menegosiasikan iklim usaha yang bersih dengan pemerintah. Dengan menolak korupsi secara kolektif, resiko “dikucilkan” dari pasar karena bersikap jujur dapat diminimalisir.

Tabel Dampak Ekosistem Bersih vs Terdistorsi Korupsi

Aspek	Ekosistem Bersih	Ekosistem Terdistorsi Korupsi
Biaya Operasional	Terprediksi dan efisien	Tinggi akibat biaya tak terduga
Inovasi	Berbasis komputer dan kreativitas	Terhambat karena ketergantungan relasi
Akses Modal	Diminati investor internasional (ESG)	Terbatas pada sumber modal berisiko

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Wirausaha memegang peran kunci yang penting sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi disektor swasta. Melalui penerapan nilai-nilai integritas, adopsi teknologi transparan, dan penguatan aksi kolektif, wirausaha dapat menciptakan “lingkaran setan” korupsi menjadi “lingkaran kebajikan” integritas. Ekosistem bisnis yang bersih bukan hanya soal moralitas, tetapi strategis bisnis yang esensial untuk keberlanjutan ekonomi nasional. Wirausaha bukan hanya tentang mencari cuan, tetapi tentang moral dalam dunia bisnis. Dengan mengadopsi teknologi, menjaga trasparansi, dan membangun budaya organisasi yang kuat, wirausaha mampu

memutus rantai korupsi dari akar. Ekosistem bisnis yang bersih bukanlah utopia, melainkan hasil dari akumulasi Keputusan etis setiap individu wirausaha.

Saran

Integritas dalam berwirausaha mungkin terasa sulit di awal karena adanya persaingan yang tidak sehat, namun dalam jangka panjang, bisnis yang jujur akan memiliki daya tahan (sustainability) yang jauh lebih kuat dan kepercayaan konsumen yang lebih tinggi. Untuk mewujudkan ekosistem bisnis yang benar-benar bersih, diperlukan langkah-langkah strategis dari berbagai pihak:

a. Bagi Pelaku Wirausaha

1. Digitalisasi Sistem
2. Sertifikasi Anti-Suap
3. Transparansi Rantai Pasok

b. Bagi Pemerintah dan Regulator

1. Penyederhanaan Birokrasi
2. Pemberian Insentif

c. Bagi Asosiasi Bisnis

Kolektifitas Aksi.

DAFTAR PUSTAKA

- KPK RI. (2003). Panduan Pencegahan Korupsi untuk Dunia Usaha (CEK). Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Pancasilawan, R., et ai. (2021). Pentingnya Integritas Wirausaha dalam Menghadapi Ekonomi Digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- OECD. (2014). *OECD Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics, and Compliance*. (Pedoman praktik untuk perusahaan menghindari korupsi).
- Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akutansi (JEBISMA) HOME/ARCHIVES/VOL. 3 NO. 2 (2025):DESEMBER2025/
<http://ejournal.media-edutama.org/index.php/jebisma/article/view/165>
- HOME/Archives/Vol. 24 No. 1 (2024): Jurnal Manajemen Maranatha/ Article
<https://journal.maranatha.edu/index.php/jmm/article/view/9803>.
-